



I PENDAHULUAN

1.1. Data Umum

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

1.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Pelaihari. Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di antara 114° 30' 22" - 115° 10' 30" BT dan 3° 30' 3" - 4° 10' 30" LS, dengan luas wilayah 3.631,35 Km² atau sekitar 9,71 persen dari total luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, posisi Tanah Laut sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Banjarmasin (ibukota Propinsi) dan Laut Jawa, serta memiliki pantai dan pelabuhan sebagai jalur distribusi barang dari dan ke luar daerah.

Keadaan wilayahnya terdiri dari dataran tinggi dan bergunung-gunung, dataran rendah, serta pantai dan rawa. Jenis tanahnya sangat beragam yaitu latosol (29,17 %), podsolik (32,98 %), alluvial (32,26 %) dan organosol (5,59 %). Dari segi pemanfaatannya, lahan tersebut terdiri dari pemukiman, persawahan, tegalan, kebun campuran, perkebunan, alang-alang/semak dan hutan. Temperatur udara maksimum di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2008 34,0° C sampai 325,0° C, temperatur minimum berkisar antara 20,1° C sampai 22,2° C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 26,0° C sampai 27,3° C. Dengan rata-rata kelembapan udara tiap bulan berkisar antara 80 persen sampai 83 persen. Untuk keadaan curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember sebesar 731,0 mm.

Untuk keadaan kecepatan angin, terbesar terjadi pada bulan Juli dan Agustus yang mencapai 3,9 knots dan terendah terjadi pada bulan November yakni sekitar 2,2 knots. Sedangkan keadaan penyinaran matahari secara rata – rata selama setahun sebesar 26 persen, dengan penyinaran terbanyak terjadi pada bulan Juni sebesar 40,3 persen dan terendah pada bulan Januari sekitar 9,3 persen.

1.1.2 Struktur Organisasi

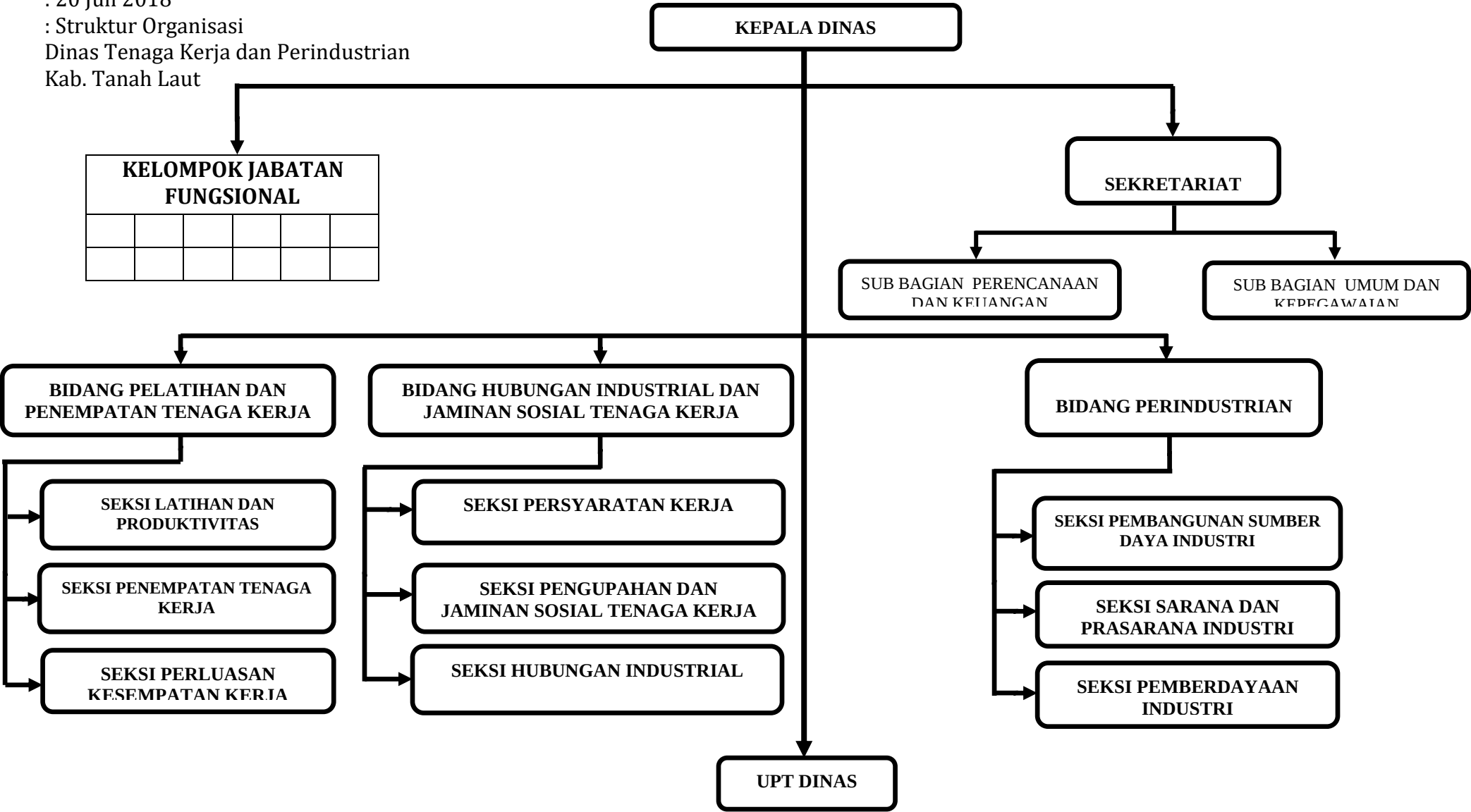
Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut No 40 Tahun 2018 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor : 40 Tahun 2018
Tanggal : 20 Juli 2018
Tentang : Struktur Organisasi
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kab. Tanah Laut

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT



1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawasan, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, hibah, investasi, pinjaman, serta pemerintah pusat.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut atas sumber daya yang dipercayakan, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas;
- 2) menyediakan informasi mengenai hasil operasional atas penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
- b. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.
- t. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;



- u. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- v. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 178 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berbasis Akrua;

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 antara lain adalah:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau barang/jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Kondisi PDRB Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

b. Tingkat inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi ditandai dengan keadaan dimana harga-harga meningkat secara terus menerus, naiknya biaya produksi, serta permintaan barang/jasa yang meningkat.

c. Nilai kurs

Nilai kurs yang stabil akan menggairahkan perekonomian, karena mengurangi gejolak naik turunnya harga barang/jasa di masyarakat. Nilai kurs di tahun 2021 relatif kurang stabil/fluktuatif pada kisaran Rp 14.100,00/US Dollar.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut diselaraskan dengan arah kebijakan pendapatan dan belanja RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 serta RKPD Tahun 2021, sebagai berikut:

Arah Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Arah Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja diarahkan pada penggunaan dana yang tersedia untuk dimanfaatkan secara optimal dan sebaik mungkin agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan :

- a. Keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan
- b. Efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil dari program dan kegiatan
- c. Memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ekonomis
- d. Dana yang tersedia dimanfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Indikator yang jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta kinerja yang ingin dicapai dari setiap kegiatan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan. Pelaporan Keuangan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

APBD belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebesar Rp. **15.394.743.445,00**. Realisasi APBD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2021 terdiri dari anggaran **Belanja Operasi** Sebesar Rp.



13.618.390.592,00 dengan realisasi sebesar Rp. **9.597.072.931,98** dan **Belanja Modal** Anggaran nya sebesar Rp. **1.776.352.853,00** dengan realisasi Rp. **1.730.358.328,00**.

Pencapaian realisasi kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	43.623.950,06
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	51.400.450,06
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp	70.756.750,18
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	39.465.400,00
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	289.629.670,00
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	134.581.363,00
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Rp	207.372.486,18
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	<u>203.833.197,06</u>
	Rp	1.040.663.266,54

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Rp	<u>40.398.200,00</u>
	Rp	40.398.200,00

3. Program Pelatihan Kerja & Produktifitas Tenaga Kerja

- Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp	457.783.960,00
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp	94.569.700,00
- Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Rp	<u>42.137.250,06</u>



Rp
594.490.910,06

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

- Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota Rp
337.487.316,34
 - Penerbitan Ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 2.095.600,00
 - Pengadaan Informasi Pasar Kerja Rp 0,00
 - Perlindungan PMI di Daerah Kabupaten/Kota Rp 39.589.900,00
- Rp
379.172.816,34

5. Program Hubungan Industrial

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya
Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Rp 68.153.300,00
 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota Rp 81.071.246,06
- Rp
149.224.546,06

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPT BLK)

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp 23.797.611,80
- Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp
111.923.300,00
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Rp
103.794.845,00
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp
183.151.638,00
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah



Daerah	<u>Rp</u>
	<u>185.090.836,00</u>
	Rp
	607.758.230,80
7. Program Perencanaan & Pembangunan Industri	
- Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<u>Rp</u>
	<u>2.030.524.834,18</u>
	Rp
	2.030.524.834,18
8. Program Pengelolaan system Informasi Industri Nasional	
- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<u>Rp</u>
	<u>113.741.600,00</u>
	Rp
	113.741.600,00

III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut.

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah unit pengguna anggaran dan unit pengguna barang yang merupakan **entitas akuntansi** keuangan daerah. Sebagai entitas akuntansi, Pengguna Anggaran menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada SKPD untuk digabung menjadi laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah.

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Pelaporan Keuangan

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut.

- a. Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- b. Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari LKPD Kabupaten Tanah Laut menggunakan basis pengukurannya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampirannya. Kebijakan basis pengukuran di atas sebagai dasar penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah.

3.3.1 Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pengukuran Belanja

1. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Penilaian

Seluruh komponen pendapatan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pendapatan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pendapatan.

3.4 Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut berupa penerbitan SPM.
- 2) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja;
- 4) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*Threshold Capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset



tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut.

- 1) Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 2) Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas;
- 3) Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas;
- 4) Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 5) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

3.5 Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos di luar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.

- 4) Ekuitas Akhir
- 5) Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.6 . Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang di beli dan di simpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

3.7 Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) Berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi, kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

3.8 Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat di realisasi (*net realized value*). Alat untuk menyesuaikan nya adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

NO	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG	KATEGORI
1	0-<1 Tahun	0,50%	lancar
2	1-2 Tahun	30%	Kurang lancar
3	>2-3 tahun	50%	Diragukan
4	>3 tahun	100%	Macet

3.9 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Aset yang di peroleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya.
- 2) Aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan overhaul pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan overhaul yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi. Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

3.10 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3.11 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.1.1. Belanja

Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebesar Rp **15.394.743.445,00** meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Belanja Daerah :	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Operasi (BO)	13.618.390.592,00	9.597.072.931,98	70,47%	7.038.645.535,00
2. Belanja Modal (BM)	1.776.352.853,00	1.730.358.328,00	97,41%	423.050.541,00
Jumlah	15.394.743.445,00	11.327.431.259,98	73,57%	7.461.696.076,00

4.1.2 Belanja Operasi Rp 9.597.072.931,98

Anggaran dan realisasi belanja operasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 terdiri dari:

<u>Belanja Operasi</u>	<u>2021</u>			<u>2020</u>
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	%	<u>Realisasi</u>
1) Belanja Pegawai	8.632.506.573,00	5.430.499.632,00	62,90%	4.971.121.046,00
2) Belanja Barang & Jasa	4.527.384.020,00	3.823.414.324,98	84,45%	2.067.524.489,00
3) Belanja Hibah	458.499.999,00	343.158.975,00	74,84%	0,00
Jumlah	13.618.390.592,00	9.597.072.931,98	70,47%	7.038.645.535,00

Realisasi Belanja Operasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp **9.597.072.931,98,00** atau **70,47%** dari anggarannya sebesar Rp. **13.618.390.592,00** Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Belanja Pegawai		2021			2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Gaji & Tunjangan	4.003.177.732,00	2.464.630.350,00	61,56%	4.971.121.046,00
	Gaji Pokok/Uang Representasi	3.055.971.695,00	1.904.342.092,00	62,31%	2.008.822.759,00
	Tunjangan Keluarga	427.836.037,00	188.918.642,00	44,15%	218.074.578,00
	Tunjangan Jabatan *)	184.730.000,00	181.675.000,00	98,34%	182.565.000,00
	Tunjangan Fungsional	70.000.000,00	41.210.000,00	58,87%	44.374.900,00
	Tunjangan Fungsional Umum	56.560.000,00	28.855.000,00	51,01%	29.495.000,00
	Tunjangan Beras *)	180.000.000,00	113.989.080,00	63,32%	109.136.940,00
	Tunjangan PPh / Khusus	28.000.000,00	5.616.907,00	20,06%	5.568.983,00
	Pembulatan Gaji	80.000,00	23,629,00	29,53%	26.926,00
2)	Tambahan Penghasilan	4.629.328.841,00	2.965.869.282,00	64,06%	2.373.055.960,00
	Prestasi Kerja	4.629.328.841,00	2.965.869.282,00	64,06%	2.373.055.960,00
Jumlah		8.632.506.573,00	5.430.499.632,00	62,90%	4.971.121.046,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 5.430.499.632,00** atau **62,90%** dari anggarannya sebesar **Rp. 8.632.506.573,00** dan tahun 2020 sebesar **Rp. 4.971.121.046,00**

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Uang/jasa Untuk diberikan Kepada Pihak



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Ketiga/Pihak lain/Masyarakat, dengan anggaran/realisasi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1) Belanja Barang	1.117.758.015,00	906.622.580,00	81,11%	179.187.180,00
- Barang Pakai Habis	1.117.758.015,00	906.622.580,00	81,11%	0,00
2) Belanja Jasa	1.761.653.955,00	1.518.020.808,98	86,17%	0,00
- Jasa kantor	1.611.349.831,00	1.370.980.733,00	85,08%	621.634.861,00
- Iuran Jaminan/Asuransi	38.404.124,00	37.435.075,98	97,47%	0,00
- Sewa Peralatan & Mesin	21.500.000,00	20.850.000,00	96,97%	0,00
- Sewa Gedung & Bangunan	400.000,00	400.000,00	100%	0,00
- Jasa Konsultansi Konstruksi	75.000.000,00	74.635.000,00	99,51%	0,00
- Kursus Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan & Pelatihan	15.000.000,00	13.720.000,00	91,46%	0,00
- Bahan / Material	0,00	0,00	0 %	86.197.550,00
- Premi Asuransi	0,00	0,00	0 %	21.660.615,00
- Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0 %	74.826.303,00
- Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0 %	73.048.300,00
- Sewa Rumah/ Gedung/ Parkir	0,00	0,00	0 %	250.000,00
- Makanan & Minuman	0,00	0,00	0 %	154.606.000
- Pakaian Kerja	0,00	0,00	0 %	4.000.000,00
- Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu	0,00	0,00	0 %	6.000.000,00
3) Belanja Pemeliharaan	535.087.050,00	515.979.636,00	96,42%	51.400.000,00
- Pemeliharaan Peralatan & Mesin	193.862.100,00	0,00	0 %	0,00
- Pemeliharaan Gedung & Bangunan	293.154.950,00	289.086.750,00	98,61%	0,00
- Pemeliharaan Jalan, Jaringan & Irigasi	48.070.000,00	46.546.000,00		0,00
4) Belanja Perjalanan dinas	1.088.885.000,00	858.791.300,00	78,86%	711.813.680,00
- Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.088.885.000,00	858.791.300,00	78,86%	0,00
5) Belanja Uang / Jasa Untuk	24.000.000,00	24.000.000,00	100%	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
- Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00	100%	0,00
Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimtek PNS	0,00	0,00	0%	6.400.000,00
Honorarium / Tim Panitia	0,00	0,00	0%	76.500.000,00
Jumlah	4.527.384.020,00	3.823.414.324,98	84,45%	2.067.524.489,00

3). Belanja Hibah

Belanja Hibah meliputi belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dengan anggaran/realisasi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Belanja Hibah		2021			2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	458.499.999,00	343.158.975,00	74,84%	0,00
Jumlah		458.499.999,00	343.158.975,00	74,84%	0,00

4.1.3 Belanja Modal (BM) Rp 1.730.358.328,00

Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset tetap Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Belanja Modal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Belanja Modal		2021			2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Peralatan dan Mesin	1.173.766.913,00	1.132.559.328,00	96,48%	208.649.000,00
(2)	Gedung dan Bangunan	602.585.940,00	597.799.000,00	99,20%	199.401.541,00
3)	Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Jumlah		1.776.352.853,00	1.730.358.328,00	97,41%	423.050.541,00

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 1.132.559.328,00** atau **96,48 %** dari anggarannya sebesar **Rp. 1.173.766.913,00** Selanjutnya atas anggaran/realisasi belanja modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Peralatan dan Mesin- Pengadaan Perkakas bengkel khusus	0,00	0,00	0 %	3.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0 %	3.000.000,00

b. Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat Besar Darat	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0 %	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0 %	0,00



c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor & Rumah Tangga	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Peralatan & Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0 %	94.180.000,00
Belanja Modal Alat kantor	134.255.395,00	129.224.949,00	96,25%	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	140.842.068,00	133.917.754,00	95,08%	0,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	46.310.110,00	34.332.375,00	74,13%	0,00
Jumlah	321.407.573,00	297.475.078,00	92,55%	94.180.000,00

d. Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Peralatan dan Mesin- Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0 %	80.441.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	52.950.480,00	51.908.000,00	98,03%	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	6.937.480,00	6.820.000,00	98,30%	0,00
Jumlah	59.887.960,00	58.728.000,00	98,06%	80.441.000,00

e. Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0 %	28.275.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	12.506.940,00	6.500.000,00	51,97%	0,00
Jumlah	12.506.940,00	6.500.000,00	51,97%	28.275.000,00

f. Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja Modal Alat Laboratorium	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Peralatan dan Mesin- Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0 %	803.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	14.179.440,00	13.956.250,00	98,42%	0,00
Jumlah	14.179.440,00	13.956.250,00	98,42%	803.000,00

g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

Peralatan dan Mesin- Alat Keamanan dan Perlindungan	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Peralatan dan Mesin- Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0 %	1.950.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0 %	1.950.000,00

h. Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja Modal Alat Angkutan	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	750.000.000,00	741.500.000,00	98,86%	0,00
Jumlah	750.000.000,00	741.500.000,00	98,86%	0,00

i. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel & Alat Ukur	2021			2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	15.785.000,00	14.400.000,00	91,22%	0,00
Jumlah	15.785.000,00	14.400.000,00	91,22%	0,00

2. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **597.799.000,00** atau **99,20 %** dari anggarannya sebesar Rp **602.585.940,00** Selanjutnya atas anggaran/realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung		2021			2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	602.585.940,00	597.799.000,00	99,20%	199.401.541,00
Jumlah		602.585.940,00	597.799.000,00	99,20%	199.401.541,00



V. KOMPONEN NERACA

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	Kas di Kas SKPD Dinas		
5.1	Tenaga Kerja Dan Perindustrian	1.496.850,00	802,600,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar **Rp 0,00** dan **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	Rekening Giro :		
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Bank Kalsel Cab. TALA No. Rek. 007.00.04.00529.2	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar **Rp 0,00** karena sisa uang persediaan Tahun Anggaran 2021, telah disetor Kas Daerah tanggal 31 Desember 2021.

5.2. Aset Lancar

Saldo Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar **Rp. 1.496.850,00** dan **Rp. 802.600,00** yaitu :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Persediaan	1.496.850,00	802.600,00

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Persediaan ATK		802.600,00
	- Kertas HVS F4	350.000,00	
	- Balpoint Baliner	192.000,00	
	- Tinta Printer	440.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	- Map Jepit	465.000,00	
	- Isi Stafles Kecil	8.850,00	
	- Balpoint	41.000,00	
	Jumlah	1.496.850,00	802.600,00

5.3 Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.3 Aset Tetap	46.317.783.487,00	44.587.425.159,00

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar **Rp. 46.317.783.487,00** dan **Rp. 44.587.425.159,00** yang terdiri dari :

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Tanah	7.716.208.952,42	7.716.208.952,42,00
Peralatan dan Mesin	6.129.868.099,30	4.997.308.771,30
Gedung dan Bangunan	10.268.696.065,59	9.670.897.065,59
Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.348.459.053,69	29.348.459.053,69
Aset Tetap Lainnya	12.415.000,00	12.415.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.938.0000	41.938.000
Akumulasi Penyusutan	(7.199.801.684,00)	(7.199.801.684,00)
Jumlah	46.317.783.487,00	44.587.425.159,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Tanah	<u>7.716.208.952,42</u>	<u>7.716.208.952,42</u>

Jumlah asset tetap **Tanah** pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 dan 2020 mendapatkan hibah dari PLTBG sebesar **Rp. 7.716.208.952,42** dan **Rp. 7.716.208.952,42** dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Saldo Awal	7.716.208.952,42	7.716.208.952,42
	Jumlah	7.716.208.952,42	7.716.208.952,42

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	6.129.868.099,30	4.997.308.771,30

Jumlah aset tetap **peralatan dan mesin** sebesar Rp. **6.129.868.099,30** merupakan nilai akumulasi peralatan dan mesin per 31 Desember 2021, pada tahun anggaran 2021 terdapat penambahan dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan asset :

- Belanja Modal Alat Angkutan – BM Alat Angkutan Darat Bermotor Rp 741.500.000,00
- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur – BM Alat Bengkel Bermesin Rp 14.400.000,00
- Belanja Modal Alat kantor dan Rumah Tangga – BM Alat Kantor – BM Alat Rumah Tangga – BM Meja dan Kursi kerja/Rapat Pejabat Rp 297.475.078,00
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar – BM Alat Komunikasi Rp 6.500.000,00
- Belanja Modal Alat Laboratorium – BM Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp 13.956.250,00
- Belanja Modal Komputer – BM Komputer Unit – BM Peralatan Komputer Rp 58.728.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

	Jumlah	Rp 1.132.559.328,00
	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	10.268.696.065,59	9.670.897.065,59

Saldo **Gedung dan Bangunan** per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 10.268.696.065,59** dan 2020 sebesar **Rp. 9.670.897.065,59** terdapat penambahan dengan rincian sebagai berikut :

Penambahan asset :

- Belanja Modal Bangunan Gedung – Bm Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp 597.799.000,00

	Jumlah	Rp 597.799.000,00
	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.348.459.053,69	29.348.459.053,69

Saldo **Jalan, Irigasi dan Jaringan** pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar **Rp. 29.348.459.053,69** dan **Rp. 29.348.459.053,69** dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Saldo Awal	29.348.459.053,69	29.348.459.053,69
	Jumlah	29.315.708.651,69	29.315.708.651,69



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	12.415.000,00	12.415.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar **Rp. 12.415.000,00** dan **Rp. 12.415.000,00** dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Saldo Awal	12.415.000,00	12.415.000,00
	Jumlah	12.415.000,00	12.415.000,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
6. Kontruksi Dalam Pengerjaan	41.938.000,00	41.938.000,00

Saldo **Kontruksi Dalam Pengerjaan** per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 41.938.000,00** dan 2020 sebesar **Rp 41.938.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Pagar Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian	41.938.000,00	41.938.000,00
	Jumlah	41.938.000,00	41.938.000,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.199.801.684,00)	(7.199.801.684,00)



Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tanggal neraca.

Penyusutan terhadap Aset Tetap pertama kali diterapkan pada tahun buku 2016 dan jumlah akumulasi penyusutan untuk tahun 2021 sebesar **Rp(7.199.801.684,00)** sedangkan jumlah akumulasi penyusutan untuk tahun 2021 yang ada pada neraca Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan jumlah yang ada belum merupakan jumlah Akumulasi Penyusutan Tahun 2021.

5.4 Aset Lainnya

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Lainnya	166.997.500,00	166.997.500,00

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar **Rp. 166.997.500,00** dan **Rp166.997.500,00** terdiri atas:

• Tagihan Jangka Panjang	Rp	00,00
• Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	00,00
• Aset Tidak Berwujud	Rp	39.200.000,00
• Aset Lain-lain	Rp	140.477.500,00
• Akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	(12.680.000,00)
• Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	Rp	00,00

Jumlah

Rp	166.997.500,00
----	----------------



	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Jumlah Ekuitas Dana	46.486.277.837,00	44.743.929.539,00
	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	46.486.277.837,00	44.743.929.539,00

5.5 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar **Rp46.486.277.837,00** dan **Rp. 44.743.929.539,00**. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban.

VI. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

A. Penyajian LO Tahun Anggaran 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut menyajikan LO.

B. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
1	Beban Pegawai	5.430.499.632,00	4.971.121.046,00
2	Beban Barang dan Jasa	3.811.424.354,98,00	2.476.821.210,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
3	Beban Hibah	343.158.975,00	0,00
4	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	408.740.924,00
5	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	224.203.757,00
6	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	736.598.344,00
7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	(15.950,00)
8	Beban Amortisasi Tidak Berwujud	0,00	7.840.000,00
	JUMLAH	9.585.082.961,98	8.825.309.331,00

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi adalah sebagai berikut.

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut.

NO	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.904.342.092,00	2.011.700.359,00
2	Beban Tunjangan Keluarga	188.918.642,00	218.419.890,00
3	Beban Tunjangan Jabatan	181.675.000,00	182.565.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional	41.210.000,00	44.374.900,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	28.855.000,00	29.495.000,00
6	Beban Tunjangan Beras	113.989.080,00	109.136.940,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.616.907,00	5.714.387,00
8	Beban Pembulatan Gaji	23.629,00	27.910,00
9	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	2.965.869.282,00	2.373.055.960,00
	Jumlah	5.430.499.632,00	4.974.490.346,00



2. Beban Barang dan Jasa

No	Jenis Beban Barang dan Jasa	SALDO 2021	SALDO 2020
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26.427.775,00	0,00
2	Beban Bahan – Isi Tabung Gas	665.000,00	0,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	194.455.895,00	84.234.880,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	31.736.800,00	0,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.853.400,00	14.321.000,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.000.000,00	2.430.000,00
7	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	11.320.000,00
8	Beban Persediaan spanduk/dekorasi/baliho	0,00	69.727.000,00
9	Beban persediaan hadiah dalam bentuk barang	0,00	1.980.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.237.100,00	0,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24.582.500,00	19.807.600,00
12	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.719.500,00	0,00
13	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Suvenir Cendera Mata	41.033.400,00	0,00
14	Beban Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	4.212.500,00	0,00
15	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	229.063.060,00	0,00
16	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak lain	8.100.000,00	0,00
17	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	3.525.000,00	0,00
18	Beban persediaan makanan pokok	0,00	86.197.550,00
19	Beban persediaan peralatan komputer	0,00	0,00
20	Beban Tagihan Telpon	364.541,00	1.002.800,00
21	Beban Tagihan Air	4.367.788,00	3.775.630,00
22	Beban Tagihan listrik	75.199.812,00	81.814.521,00
23	Beban langganan Jurnal/surat kabar/majalah	2.880.000,00	3.240.000,00
24	Beban kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan	24.210.441,00	51.143.588,00
25	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	33.033.126,00	0,00
26	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	1.968.848,04	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

27	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	2.433.101,94	0,00
28	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19.500.000,00	0,00
29	Beban Sewa Suara	1.350.000,00	0,00
30	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000,00	0,00
31	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	74.635.000,00	0,00
32	Beban Bimbingan Teknis	13.720.000,00	0,00
33	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	135.716.136,00	0,00
34	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.580.750,00	0,00
35	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.050.000,00	0,00
36	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.220.000,00	0,00
37	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.130.000,00	0,00
38	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7.650.000,00	0,00
39	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	230.979.750,00	0,00
40	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	58.107.000,00	0,00
41	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	41.266.000,00	0,00
42	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	5.280.000,00	0,00
43	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	458.098.800,00	0,00
44	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.692.500,00	0,00
45	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	24.000.000,00	0,00
46	Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	320.438.200,00	0,00
47	Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.720.775,00	0,00
48	Beban jasa paket/ Pengiriman	0,00	0,00
49	Beban jasa tenaga ahli	81.765.912,00	153.050.000,00
50	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	108.888.519,00	0,00
51	Beban Jasa Penyelenggara Acara	5.000.000,00	0,00
52	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	153.500.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

53	Beban dokumentasi	0,00	823.000,00
54	Beban jasa premi asuransi kesehatan	0,00	22.815.893,00
55	Beban premi asuransi jaminan kecelakaan kerja	0,00	1.084.747,00
56	Beban premi asuransi jaminan kematian	0,00	1.355.943,00
57	Beban jasa service	0,00	10.150.000,00
58	Beban penggantian suku cadang	0,00	19.020.000,00
59	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.220.000,00	42.186.003,00
60	Beban surat tanda nomor kendaraan	0,00	10.674.300,00
61	Beban cetak	0,00	28.169.500,00
62	Beban penggandaan	0,00	54.524.500,00
63	Beban penjilidan	0,00	2.030.000,00
64	Beban sewa ruang rapat / pertemuan	0,00	250.000,00
65	Beban sewa sarana mobilitas darat	0,00	0,00
66	Beban Makanan dan Minuman Rapat	78.030.000,00	60.601.000,00
67	Beban Makan dan Minum Jamuan Tamu	21.760.000,00	0,00
68	Beban makanan dan minuman Aktivitas Lapangan	140.205.000,00	97.425.000,00
69	Beban pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.891.400,00	4.000.000,00
70	Beban pakaian batik tradisional	41.210.000,00	6.000.000,00
71	Beban perjalanan dinas dalam daerah	0,00	395.715.000,00
72	Beban perjalanan dinas luar daerah	0,00	422.030.580,00
73	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	0,00	41.695.000,00
74	Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	0,00	33.000.000,00
75	Beban pemeliharaan aset tetap lainnya	0,00	5.000.000,00
76	Beban kepesertaan	0,00	6.400.000
77	Beban honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap – LO	0,00	499.378.000,00
78	Beban honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	186.250.000,00	0,00
79	Beban honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	198.383.000,00	0,00
80	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	151.200.000,00	0,00
81	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.275.000,00	0,00
82	Beban Jasa Tenaga Administrasi	365.400.000,00	0,00
83	Honorarium Tim/Panitia – LO	0,00	76.500.000,00
84	Beban Persediaan BBM	0,00	5.952.455,00
85	Beban Pengadaan Perlengkapan Tidur	0,00	9.100.000,00
Jumlah		3.811.424.354,98	2.465.525.490,00



3. Beban Hibah

NO	Jenis Hibah	SALDO 2021	SALDO 2020
1	Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	320.438.200,00	0,00
2	Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.720.775,00	0,00
	JUMLAH	343.158.975,00	0,00

VII PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019.

Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mulai disajikan Tahun Anggaran 2016. Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 46.486.277.837,00** berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 44.743.929.539,00** dikurangi Defisit-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. (9.585.082.961,98)** dan ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar **Rp. 11.327.431.259,98**

A. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 44.743.929.539,00**

B. Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2021

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp **(9.585.082.961,98)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa, Negara serta Daerah.

Pelaihari, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

MASTURI.S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004



L A M P I R A N